

# ANALISIS KINERJA ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERMERINTAH KOTA SAMARINDA

**Rani Febri Ramadani. Elfreda Aplonia Lau, Suyatin**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email: [ranifebri94@yahoo.com](mailto:ranifebri94@yahoo.com)

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah.(2) untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja operasi, belanja modal, dan efisiensi belanja. Adapun rasio keuangan yang digunakan meliputi: analisis varians (selisih) pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, Derajat Desentralisasi, rasio efektivitas PAD, analisis varians (selisih) belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) berupa suatu dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda secara umum dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah dengan rata-rata 1,17%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 16,75%, (c) Rasio Kemandirian Daerah rata-rata 12,73%, (d) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 11,22%, dan rasio efektivitas rata-rata besar dari 100% yaitu 100,37%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata 1,10%, (b) Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 18,26%, (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 66,17% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 33,79%. (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata dibawah 100% yaitu 76,36%.

**Kata Kunci: Kinerja, Realisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota

Samarinda sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan dan Pemukiman yang Berwawasan Lingkungan perlu dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang akan menjadi salah satu acuan dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda perlu mendapat dukungan penganggaran yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Penyusunan KUA ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan suatu pedoman dan atau petunjuk untuk kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2014 (RAPBD 2014). Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan, penyusunan KUA 2014 merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah Kota Samarinda. KUA 2014 disusun dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Berikut ini disajikan mengenai Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda sejak tahun 2010 sampai dengan 2014:

Tabel : 1.1  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda

Tahun	Anggaran pendapatan (Rp)	Anggaran belanja (Rp)
2010	2.035.031.417.531,00	2.141.435.090.952,00
2011	1.914.290.354.872,00	1.856.325.806.268,00
2012	2.312.250.128.138,00	2.677.737.799.272,00
2013	2.697.071.997.283,01	3.841.356.806.287,00
2014	3.048.932.183.316,26	3.890.928.664.090,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.007.576.081.140,30</b>	<b>14.407.784.166.869,00</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>2.401.515.216.228,05</b>	<b>2.881.556.833.373,80</b>

Sumber: LRA BPKAD Kota Samarinda, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan Pemerintah daerah Kota Samarinda pada tahun 2010 sampai tahun 2011 menurun dan kembali meningkat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Begitu juga sebaliknya, realisasi belanja Pemerintah daerah Kota Samarinda

pada tahun 2011 menurun dan kembali meningkat ditahun 2012 hingga tahun 2014. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja daerah menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya pada pemerintah kota Samarinda.

Tabel 1.2  
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda

Tahun	realisasi pendapatan (Rp)	realisasi belanja (Rp)
2010	1.524.879.313.389,62	1.508.287.504.807,38
2011	2.068.470.073.728,48	1.475.901.584.953,97
2012	2.713.207.587.342,69	2.005.650.172.493,47
2013	2.567.632.606.693,65	2.869.579.631.651,84
2014	2.845.036.423.374,66	3.201.662.936.936,86
<b>Jumlah</b>	<b>13.086.586.405.442,00</b>	<b>12.614.727.652.677,60</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>2.181.097.734.240,33</b>	<b>2.102.454.608.779,60</b>

Sumber: LRA BPKAD Kota Samarinda, 2016

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Pemerintah daerah Kota Samarinda pada tahun 2010 sampai tahun 2014 selalu meningkat. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah daerah Kota Samarinda pada tahun 2011 menurun dan kembali meningkat ditahun 2012 hingga tahun 2014. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah realisasi Pendapatan dan Belanja daerah menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dapat ditarik yaitu:

1. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari varians pendapatan sudah baik?
2. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari pertumbuhan pendapatan positif?
3. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari Derajat Desentralisasi sangat baik?
4. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari kemandirian keuangan daerah sudah tinggi?
5. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah sangat efektif?
6. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari varians belanja selisih menguntungkan?
7. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari pertumbuhan belanja sudah positif?
8. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari belanja operasi sangat serasi?
9. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari

belanja modal sangat serasi?

10. Apakah Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari efisiensi belanja sudah efisien?

## DASAR TEORI

### A. Akuntansi Sektor Publik

#### 1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2010:3), “Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.”

#### 2. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah menurut Abdul Halim (2012:43) yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah”. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut dengan pengurusan bendaharawan.

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya baik di sektor publik maupun di suatu perusahaan yang mana kinerja ini sangat penting dalam berbagai kegiatan apapun.

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik yaitu untuk memperbaiki kehidupan

masyarakat dengan cara memberikan pelayanan terbaik yang hal itu seringkali sulit diukur dengan ukuran finansial. Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995:20).

#### a. Anggaran Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan No 02 paragraf 8, anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Untuk memahami akuntansi anggaran tidak bisa terlepas dari siklus akuntansi anggaran.

#### Analisis Varians Pendapatan

Pemerintah Daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik.

#### Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif dan kecenderungan (trend) meningkat. Sebaliknya. Jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan bahwa terjadi penurunan Kinerja

Keuangan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan Pendapatan Daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

#### Rasio Derajat Desentralisasi

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi 2006:142).

#### Rasio Kemandirian Daerah

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Abdul Halim, 2012:277).

#### Rasio Efektivitas Pendapatan

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Abdul Halim, 2012:278).

#### b. Pendapatan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan No 02 paragraf 8, pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

#### Analisis Varians Belanja

Selisih menguntungkan terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak menguntungkan terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya.

#### Analisis Pertumbuhan Belanja

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

### Rasio Belanja Operasi

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (*recurrent*).

### Rasio Belanja Modal

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi.

### Rasio Efisiensi Belanja

Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%.Sebaliknya, jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

### B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan dasar teori maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari varians pendapatan baik
2. Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari pertumbuhan pendapatan positif
3. Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari Derajat Desentralisasi sangat baik
4. Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari kemandirian keuangan daerah tinggi
5. Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari

rasio efektivitas pendapatan asli daerah sangat efektif

6. Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari varians belanja selisih menguntungkan
7. Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari pertumbuhan belanja positif
8. Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari belanja operasi terhadap total belanja sangat serasi
9. Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari belanja modal terhadap total belanja sangat serasi
10. Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari efisiensi belanja sudah efisien

## METODE PENELITIAN

### A. Rincian Data Yang Diperlukan

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. Data tersebut merupakan dokumentasi dari Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2010 sampai dengan 2014 serta data-data lain yang terkait.

### B. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap data-data keuangan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2010-2014 khususnya data yang ingin diteliti yaitu anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) berupa suatu dokumentasi.

#### D. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

##### Alat Analisis

##### 1. Analisis Varians Pendapatan

Analisis ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:137) :

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasin} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

##### 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:139) :

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

##### 3. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

##### 4. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:142):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

##### 5. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Abdul Halim, 2012) :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendappatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

##### 6. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:157) :

$$\text{Varian} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

##### 7. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan belanja dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:160) :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)} \times 100\%$$

##### 8. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:164) :

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

9. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:165) :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

10. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja daerah dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:166) :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**ASIL PENELITIAN**

1. Analisis Varians Pendapatan

Hasil perhitungan Varians Pendapatan akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria diatas dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 5.1  
Perhitungan VariansPendapatan Pemerintah  
Daerah Kota Samarinda Tahun  
2010 - 2014

Tahun	Keterangan			
	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Varians Pendapatan (Rp)	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
2010	1.524.879.313.389,62	2.035.031.417.531,00	510.152.104.141,38	Kurang Baik
2011	2.068.470.073.728,48	1.914.290.354.872,00	154.179.718.856,48	Baik
2012	2.713.207.587.342,69	2.312.250.128.138,00	400.957.459.204,69	Baik
2013	2.567.632.606.693,65	2.697.071.997.283,01	129.439.390.589,36	Kurang Baik
2014	2.845.036.423.374,66	3.048.932.183.316,26	203.895.759.941,60	Kurang Baik

Sumber : Data diolah, 2016

menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dapat dikatakan kurang baik. Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat varians pendapatan yang ditunjukkan dengan sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih lebih hanya pada tahun 2011, 2012, dan di tahun 2010, 2013, 2014 yang mengalami selisih kurang. Jika dilihat dari lima periode yang diteliti, maka varians pendapatan paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu Rp 400.957.459.204,69, sedangkan varians pendapatan paling rendah terjadi pada tahun 2010 yaitu Rp - 510.152.104.141,38. Hasil Penelitian ini tidak mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:137) yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Hasil perhitungan Pertumbuhan Pendapatan akan rekapitulasi dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan tabel berikut:

Analisis varians secara umum

Tabel 5.3  
Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun  
2010 - 2014

Tahun	Keterangan		
	Realisasi Pendapatan tahun (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	1.367.260.400.912,86	-	-
2010	1.524.879.313.389,62	11,52%	Positif
2011	2.068.470.073.728,48	35,64%	Positif
2012	2.713.207.587.342,69	31,16%	Positif
2013	2.567.632.606.693,65	-5,36%	Negatif
2014	2.845.036.423.374,66	10,80%	Positif

Sumber : Data diolah, 2016

Rasio pertumbuhan pada tahun 2010 yaitu sebesar 11,52%. Pada 2011 rasio pertumbuhan menjadi 35,64%, namun sama halnya dengan rasio pertumbuhan pada tahun 2010, rasio pertumbuhan pada tahun 2011 sudah membaik dikarenakan presentase positif. Di tahun 2012 pertumbuhan menurun menjadi 31,16% tetapi masih sangat baik. Pada tahun 2013 rasio pertumbuhan mengalami penurunan yang cukup besar yaitu -5,36%, rasio pertumbuhannya sangat buruk karena presentase negatif. Ditahun 2014 rasio pertumbuhan kembali meningkat menjadi 10,80% dan mulai membaik kembali, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan hampir

cukup baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 peningkatan paling besar yaitu 35,64%. Rasio tersebut berada sangat baik pertumbuhannya dibanding tahun 2010, 2012, 2013 dan di tahun 2014. Jadi secara keseluruhan pertumbuhan PAD dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sangat baik terkecuali ditahun 2013 yang sangat buruk.

### 3. Rasio Derajat Desentralisasi

Capaian hasil perhitungan Derajat Desentralisasi akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan kriteria berikut ini:

Tabel 5.5  
Perhitungan Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun  
2010 - 2014

Tahun	Keterangan			
	Realisasi PAD (Rp)	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)	(5)
2010	128,045,968,056.6 2	1,524,879,313,389.6 2	8.40%	Sangat Kurang
2011	188,813,379,533.4 8	2,068,470,073,728.4 8	9.13%	Sangat Kurang
2012	273,741,456,947.6 9	2,713,307,587,342.6 9	10.09%	Kurang
2013	338,158,272,078.6 5	2,567,632,606,693.6 5	13.17%	Kurang
2014	435,498,980,673.6 6	2,845,036,423,374.6 6	15.31%	Kurang

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2010: 8,40%, 2011: 9,13%, 2012 : 10,09%, 2013: 13,17% dan di tahun 2014: 15,31%. Berdasarkan skala interval kemampuan daerah menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 penilaian pada tahun 2010 sampai tahun 2011 dapat dikatakan sangat kurang, namun pada tahun 2012 hingga tahun 2014 penilaian meningkat menjadi kurang. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk menggali dan mengelola sumber daya yang

dimiliki masih sangat rendah dan semakin menurun pula kemampuan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rata-rata tingkat desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Samarinda sepanjang tahun 2010 s/d 2014 adalah 11.22% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiscal adalah kurang.

#### 4. Rasio Kemandirian Daerah

Hasil perhitungan Kemandirian akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 5.7

Perhitungan Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 - 2014

Tahun	Keterangan			
	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi & Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)	(5)
2010	128,045,968,056.6 2	1,396,833,345,333.0 0	9.17%	Rendah Sekali
2011	188,813,379,533.4 8	1,879,656,694,195.0 0	10.05%	Rendah Sekali
2012	273,741,456,947.6 9	2,439,566,130,395.0 0	11.22%	Rendah Sekali
2013	338,158,272,078.6 5	2,229,474,334,615.0 0	15.17%	Rendah Sekali
2014	435,498,980,673.6 6	2,409,537,442,701.0 0	18.07%	Rendah Sekali

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 5.7 dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 masih sangat rendah yaitu rasio kemandirian di tahun 2010 sebesar 9,17%, tahun 2011 sebesar 10,05%, tahun 2012 sebesar 11,22%, tahun 2013 sebesar 15,17%, dan ditahun 2014 sebesar 18,07%., hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya PAD yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana

ekstern dan meminta kewenangan untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikelola oleh pemerintah pusat.

#### 5. Rasio Efektivitas PAD

Hasil perhitungan Efektivitas PAD akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 5.9  
Perhitungan Efektifitas Pemerintah Asli Daerah Kota Samarinda Tahun  
2010 - 2014

Tahun	Keterangan			
	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio efektifitas	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)	(5)
2010	128.045.968.056,62	150.000.000.000,00	85,36%	Kurang Efektif
2011	188.813.379.533,48	182.560.000.000,00	103,42%	Sangat Efektif
2012	273.741.456.947,69	228.445.500.000,00	119,82%	Sangat Efektif
2013	338.158.272.078,65	286.904.776.836,46	117,86%	Sangat Efektif
2014	435.498.980.673,66	577.555.670.510,00	75,40%	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Samarinda selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 PAD dianggarkan sebesar Rp 128.045.968.056,62 atau 7,37% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2011 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 188.813.379.533,48 atau 9,53% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2012 PAD dianggarkan sebesar Rp 273.741.456.947,69 atau 9,87% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 338.158.272.078,65 atau 10,63% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2014 anggaran PAD kembali naik menjadi Rp 435.498.980.673,66 atau 18,94% dari total anggaran pendapatan. Realisasi PAD Kota Samarinda dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2010 PAD Kota Samarinda sebesar Rp 128.045.968.056,62 atau sebesar 8,39% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2011 yaitu menjadi Rp 188.813.379.533,48 atau sebesar 9,12% dari total pendapatan. Pada tahun 2012 PAD Kota Samarinda mengalami kenaikan menjadi Rp 273.741.456.947,69 atau sebesar 10,08% dari total pendapatan. Pada tahun

2013 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 338.158.272.078,65 atau sebesar 13,17% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 435.498.980.673,66 atau 15,30% dari total pendapatan. Berdasarkan perhitungan pada tabel 5. dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BPKAD Kota Samarinda pada tahun 2010 sebesar 85,36%, tahun 2011 sebesar 103,42%, tahun 2012 sebesar 119,82%, tahun 2013 sebesar 117,86%, dan tahun 2014 sebesar 75,40%. Efektivitas kinerja keuangan Kota Samarinda untuk tahun 2010 dan 2014 berjalan Kurang Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

#### 6. Analisis Varians Belanja

Hasil perhitungan Varians Belanja akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 5.10  
Perhitungan Varians (Selisih) Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun  
2010 - 2014

Tahun	Keterangan			
	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio varians Belanja (Rp)	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)	(5)
2010	1.508.287.504.807,38	2.141.435.090.952,00	-633.147.586.144,62	Menguntungkan
2011	1.475.901.584.953,97	1.856.325.806.268,00	-380.424.221.314,03	Menguntungkan
2012	2.005.650.172.493,47	2.677.737.799.272,00	-672.087.626.778,53	Menguntungkan
2013	2.869.579.631.651,84	3.841.356.806.287,00	-971.777.174.635,16	Menguntungkan
2014	3.201.662.936.936,86	3.890.928.664.090,00	-689.265.727.153,14	Menguntungkan

Sumber : Data diolah, 2016

Analisis Varians Belanja Daerah menunjukkan bahwa secara umum Kinerja Keuangan Belanja Kota Samarinda dapat dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2010-2014 yang mencapai angka rata-rata 9,48%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu Rp. 3.201.662.936.936,86 , sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu Rp.

1.475.901.584.953,97. Hasil ini juga mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan.

#### 7. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Hasil perhitungan Pertumbuhan Belanja akan direkapitulasi dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 5.12  
Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun  
2010 - 2014

Tahun	Realisasi Belanja Tahun t (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	1.553.645.821.834,06	-	
2010	1.508.287.504.807,38	2,91%	Positif
2011	1.475.901.584.953,97	-2,14%	Negatif
2012	2.005.650.172.493,47	35,89%	Positif
2013	2.869.579.631.651,84	43,07%	Positif
2014	3.201.662.936.936,86	11,57%	Positif

Sumber : Data diolah, 2016

Secara umum Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kinerja

Keuangan Belanja Kota Samarinda mengalami pertumbuhan positif. Hal ini

ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 18,26%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 43,07%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu -2,14%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari

pertumbuhan belanja sudah naik

8. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Hasil perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja akan direkapitulasi dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 5.14  
Perhitungan Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2014

Tahun	Keterangan			
	Total Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)	(5)
2010	1,075,102,746,907.38	1,508,287,504,807.38	71.28%	Serasi
2011	1,193,708,665,483.97	1,475,901,584,953.97	80.88%	Sangat Serasi
2012	1,296,481,049,483.47	2,005,650,172,493.47	64.64%	Serasi
2013	1,589,035,523,996.84	2,869,579,631,651.84	55.38%	Cukup Serasi
2014	1,878,908,770,615.86	3,201,662,936,936.86	58.69%	Cukup Serasi

Sumber : Data diolah, 2016

Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 - 2014 dilihat dari keserasian belanja daerah, secara umum dapat dikatakan sebagian kecil dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata sebesar 66,17% untuk rasio belanja operasi terhadap total belanja. Rasio belanja operasi terhadap total belanja tertinggi terjadi pada tahun 2011

yaitu 80,88%, sedangkan rasio belanja operasi terhadap total belanja terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 55,38%

9. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Hasil perhitungan Belanja Modal akan direkapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.16  
Perhitungan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2014

Tahun	Keterangan			
	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2:3)	(5)
2010	432,384,757,900.00	1,508,287,504,807.38	28.67%	Kurang Serasi
2011	281,096,174,225.00	1,475,901,584,953.97	19.05%	Tidak Serasi
2012	707,992,552,010.00	2,005,650,172,493.47	35.30%	Kurang Serasi
2013	1,280,544,107,655.00	2,869,579,631,651.84	44.62%	Cukup Serasi
2014	1,322,656,294,646.00	3,201,662,936,936.86	41.31%	Cukup Serasi

Sumber : Data diolah, 2016

Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 - 2014 dilihat dari keserasian belanja daerah, secara umum dapat dikatakan sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata sebesar 33,79% untuk rasio belanja modal terhadap total belanja. rasio belanja modal terhadap total

belanja tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 44,62%, sedangkan rasio belanja modal terhadap total belanja terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 19,05%.

#### 10. Rasio Efisiensi Belanja

Hasil perhitungan Efisiensi Belanja akan direkapitulasi dan diukur sesuai kriteria dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 5.17  
Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 - 2014

Tahun	Keterangan			
	Total Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Total Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Rasio efisiensi	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2:3)	(5)
2010	1,508,287,504,807.38	2.141.435.090.952,00	70,43 %	Efisiensi
2011	1,475,901,584,953.97	1.856.325.806.268,00	79,50 %	Efisiensi
2012	2,005,650,172,493.47	2.677.737.799.272,00	74,90 %	Efisiensi
2013	2,869,579,631,651.84	3.841.356.806.287,00	74,70 %	Efisiensi
2014	3,201,662,936,936.86	3.890.928.664.090,00	82,28 %	Efisiensi

Sumber : Data diolah, 2016

Analisis Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kota Samarinda telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2010-2014. Hal ini ditunjukkan dengan Realisasi Anggaran Belanja Kota Samarinda yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:166) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran. Dilihat dari tabel 5.10 rasio yang efisiensi belanjanya terendah terdapat pada tahun 2010 dengan persentase 70,43%, di tahun 2011: 79,50%, tahun 2012 :74,90%, di tahun 2013: 74,70%, dan di tahun 2014 terdapat persentase tertinggi 82,28%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dapat dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kota Samarinda sebesar 1,17%, maka hipotesis ditolak.
2. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum mengalami fluktuasi (naik turun) Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif meningkat yaitu 16,75%, maka hipotesis diterima.
3. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Derajat Desentralisasi Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dikatakan kurang baik dengan rata-rata sebesar 11,22%, maka hipotesis ditolak.

4. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Kemandirian Pendapatan Pemkot Samarinda dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka hipotesis ditolak.
5. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dilihat dari Efektivitas PAD Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dikatakan efektif dengan rata-rata sebesar 100,37%, maka hipotesis diterima.
6. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda dilihat dari Varians Belanja Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum dapat dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi APBD Kota Samarinda sebesar 1,10%, maka hipotesis ditolak.
7. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah Pemkot Samarinda selama tahun 2010-2014, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 18,26%, maka hipotesis diterima.
8. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda dilihat dari Keserasian Belanja Daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian kecil dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi. Selama tahun 2010-2014 rata-rata Belanja Operasi sebesar 66,17%, maka hipotesis ditolak.
9. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda dilihat dari Keserasian Belanja Daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2010-2014 rata-rata Belanja Modal sebesar 33,79%, maka hipotesis ditolak.
10. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan efisiensi belanja, maka hipotesis diterima.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk:

1. Lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini.
2. Dilakukan pada salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1974, Undang-Undang Nomor 5 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

-----, 2005, Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

-----, 2006, Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

-----, 2011, Standar Akuntansi Pemerintahan, Edisi Terbaru, Fokusmedia, Bandung

Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, Erlangga, Yogyakarta

Halim, Abdul, 2012, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta

Mahmudi, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta